

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM ELEKTRONIK
WARUNG GOTONG ROYONG (E-WARONG) DI KECAMATAN
BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

Mavita Anarizka, Nina Widowati
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Salah satu program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang baru diluncurkan tahun 2015 di Semarang adalah Elektronik Warung gotong Royong atau e-Warong adalah program warung gotong royong elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dalam program Elektronik Warung gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Banyumanik. Untuk mengukur akuntabilitas program E-Warong menggunakan dimensi *Probit and legality accountability*, *Process accountability*, *Performance accountability*, *Program accountability*, *Policy accountability*, *Financial accountability* dan faktor penghambat dan pendorong dalam akuntabilitas Program E-Warong. Adapun metode yang digunakan adalah study kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dilapangan menunjukkan belum tercapainya target dari program E-Warong, kurangnya sumber daya manusia, kreatifitas anggota dalam menangani masalah tidak dikembangkan dan minimnya respon pemimpin dalam menanggapi masalah. Hasil penelitian yang sudah dilakukan akuntabilitas pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik belum optimal dilihat dari dimensi akuntabilitas yang dijadikan tolak ukur masih belum tercapai dan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci : Kemiskinan, Program E-Warong, Akuntabilitas.

**ACCOUNTABILITY FOR IMPLEMENTING ELECTRONIC
PROGRAMS FOR MUTUAL COOPERATION STALLS (E-WARONG) DI
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

Mavita Anarizka, Nina Widowati

ABSTRACT

The problem of poverty is a problem faced and is of concern to many people in the world. One of the Government programs to alleviate poverty that was just launched in 2015 in Semarang is Electronic Warong mutual assistance or e-Warong is an electronic mutual cooperation program. This research was conducted to find out accountability in the E-Warong (Electronic Grocery Mutual Cooperation) program in Banyumanik District. To measure the accountability of the E-Warong program using the Probity and legality accountability dimensions, Process accountability, Performance accountability, Program accountability, Policy accountability, Financial accountability and the inhibiting factors in the accountability of the E-Warong Program. The method used is a case study with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The results in the field show that the targets of the E-Warong program have not yet been achieved, lack of human resources, members' creativity in dealing with problems are not developed and the lack of response of leaders in responding to problems. Result on the research that has been carried out the accountability of the implementation of the E-Warong Program (Electronic Gotong Royong Warung) in Banyumanik Subdistrict, it has not been optimally seen from the dimensions of accountability that have been measured and there are obstacles in the implementation of the program.

Keywords: *Poverty, E-Warong Program, Accountability.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Meskipun dalam tingkat yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagad raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan menurut United Nations Development Programs (UNDP) dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan- pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Kemiskinan menjadi sorotan utama yang serius bagi negara ini, semakin tingginya tingkat kemiskinan akan menjadi beban dan semakin lambat pula perkembangan serta kemajuan negara tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang belum benar-benar terlepas dari persoalan kemiskinan sejak mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia mengalami

penurunan tidak dipungkiri penurunan angka kemiskinan akan melambat di masa depan. Usaha usaha pemerintah dinilai penting dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan sifatnya dinamis.

Jawa tengah salah satu provinsi yang memiliki potret angka kemiskinan cukup tinggi. Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah mengakui angka kemiskinan di Jateng tergolong tinggi sebesar 13,9 persen, sejak masa jabatannya angka kemiskinan menurun meskipun hanya sedikit. Dibutuhkan kebijakan serta kerjama yang kuat anatara pemerintah pusat dan provinsi untuk fokus didaerah yang miskin. (dilansir dalam Tempo.co Tanggal 14 Mei 2018)

Kemiskinan sekarang ini tidak lagi hanya berada di tingkat pedesaan namun sudah menjamur ke wilayah perkotaan. Kondisi dikota selalu dituntut untuk mampu melakukan pembangunan,dengan maksud untuk

melengkapi sarana dan prasarana kota yang memadai. Pola kehidupan keluarga miskin di perkotaan ternyata sangat kompleks, dihadapkan dengan tekanan hidup yang sangat keras dan khas. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2016 sebanyak 367.848 jiwa atau 114.939 kepala keluarga (KK) di Kota Semarang masuk dalam kategori miskin.

Upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial. Salah satu program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang baru diluncurkan tahun 2015 di Semarang adalah Elektronik Warung Gotong Royong atau E-Warong. E-Warong adalah program warung gotong royong elektronik. Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital dalam bentuk ATM dengan bantuan sebesar Rp.110.000 per bulan. e-Warong dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum

sejahtera melalui sistem penyaluran yang lebih terkontrol. Tujuan dibuatnya program E-Warong adalah untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan yang lebih baik.

Sesuai Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam menjawab masalah kemiskinan Menteri Sosial (Mensos) menerjemahkannya dengan meluncurkan program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) yang mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai menjadi nontunai.

Program E-Warong yang di luncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan ini melibatkan bank pelaksana (BNI) yang menyediakan sarana transaksi digital, Bulog memiliki peran

sebagai pemasok bahan pokok, dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) berperan sebagai wakil e-Warong Kube-PKH dalam melakukan kerja sama, baik dengan bank pelaksana maupun Bulog.

E-Warong melayani penerima bantuan sosial melalui aplikasi Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera dan mesin Electronic Data Capture (EDC). Ujicoba ini dilakukan untuk penyaluran Program Beras Sejahtera serta Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kartu Keluarga Sejahtera dengan fitur uang elektronik dan tabungan yang diterbitkan oleh Himpunan Bank Negara. Tujuannya, jika semua bisa mendapatkan bantuan sosial melalui sistem non tunai tersebut, penerima PKH bisa menentukan kebutuhan pokok apa saja yang penting bagi mereka. Lebih hemat juga dalam penggunaannya dan bisa disisihkan untuk tabungan sehingga dapat lebih sejahtera.

Program ini masih mempunyai permasalahan apabila dilihat dari bentuk pertanggung jawaban atau akuntabilitas dalam pelaksanaan program E-Warong melalui dimensi akuntabilitas. Dilihat dari

akuntabilitas hukum program ini memiliki permasalahan sasaran program yang belum tepat, masih banyak warga miskin yang belum mendapatkannya atau bahkan seluruh warga di salah satu wilayah mendapatkan program ini tidak berdasarkan tingkat kemiskinan.

Dilihat dari akuntabilitas proses program ini memiliki permasalahan yaitu proses sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat membuat masyarakat belum mengerti tentang prosedur dan pemanfaatan E-Warong. Selain itu dilihat dari akuntabilitas manajerial yang melihat pengelolaan secara efektif, program ini mengalami kendala dalam pendataan warga miskin belum sepenuhnya valid dan akurat. Masih terjadi subjektifitas petugas pendata sehingga data warga miskin Kota Semarang yang dihasilkan belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini terjadi hampir di semua program penanggulangan kemiskinan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi adalah adanya warga yang pra sejahtera namun tidak tercatat sebagai warga miskin dan

pada sisi lain ada warga yang termasuk golongan mampu justru masuk dalam data warga miskin.

Selain permasalahan mengenai dimensi akuntabilitas yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang dialami terkait dengan dimensi akuntabilitas program yang menyoroti hasil dari program E-Warong ini, antara lain :

- 1) Banyaknya keluarga prasejahtera atau warga miskin di Semarang, sehingga dibutuhkan penambahan akses E-Warong ini karena untuk sekarang belum semuanya tercover;
- 2) Sejatinya E-Warong hadir untuk meringankan beban pengeluaran rakyat miskin tetapi pada kenyataannya belum bisa dimanfaatkan dengan baik, misalnya pada saat mesin kehilangan sinyal ataupun eror warga harus menunggu mesin diperbaiki baru bisa membeli bahan pokok, padahal bahan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak.
- 3) Untuk saat ini bahan pokok yang disediakan hanya beras, gula, dan minyak. Padahal masyarakat masih

membutuhkan bahan pokok lainnya dalam menunjang kebutuhan ekonomi. Bahan pokok ini dikemas dalam satu paket regular dengan hanya sekali transaksi.

- 4) Kebingungan yang dialami oleh pemilik warung pada saat melakukan transaksi, dikarenakan adanya proses penginputan data melalui tahapan yang cukup panjang dan membingungkan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh petugas hanya 3 hari.

Kebutuhan untuk memahami aspirasi warga juga didorong oleh kenyataan bahwa tuntutan dan aspirasi masyarakat mengenai perbaikan pelayanan publik sekarang ini semakin kuat dan keras. Semakin derasnya arus demokrasi menjadikan kedudukan warga semakin kuat pula. Para pejabat publik sekarang ini harus mulai mendengarkan aspirasi, keluhan, dan saran dari warganya mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan (Wahyudi Kumorotomo 2013:3).

Kesulitan untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah

terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan persyaratan penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fenomena yang dapat diamati dalam pelaksanaan pelayanan publik dewasa ini adalah pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak efisien sehingga memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit pula mengakibatkan banyak terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga menyebabkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka mengenai good governance berbeda-beda, sebagian besar dari

mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik, banyak diantara mereka yang membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Mengingat perkembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik tersebut. Salah satu wujud dari tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, untuk menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel.

Akuntabilitas (accountability) merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai

yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kumorotomo, 2011:3). Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban birokrat kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Bila pemerintah hanya berlandaskan semata-mata pada aturan yang baku (standar) tanpa mempertimbangkan misi maupun tujuan yang ingin dicapai dari sebuah program maka akan sulit baginya menciptakan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan sebelumnya sudah dijalankan namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena kurangnya tanggungjawab dalam menjalankan program tersebut. Seperti program-program sebelumnya adanya tanggungjawab yang kurang atau kurangnya akuntabilitas dari pihak

pelaksana Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Banyumanik yang ditunjukkan melalui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan dimensi akuntabilitas berdampak pada semakin banyaknya kesulitan yang dialami masyarakat mengenai program E-Warong dan masih dirasa sulit untuk dapat menjalankan program sesuai harapan, hal ini memerlukan penanganan yang lebih lanjut agar program dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka meningkatkan derajat ekonomi bagi warga miskin dan atau pra sejahtera di Kota Semarang. Dengan adanya akuntabilitas dapat mencegah adanya penyimpangan dalam proses pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah kepada pihak yang diberikan pertanggung jawaban. Dari uraian yang sudah dijelaskan dapat menjadi pertimbangan dalam penelitian yang akan saya lakukan mengenai Akuntabilitas Pelaksanaan Program Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) tahun 2017-2018 di Kecamatan Banyumanik, Semarang untuk melihat pertanggung jawaban dari program tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E – Warong) di Kecamatan Banyumanik?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E – Warong) di Kecamatan Banyumanik?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Akuntabilitas Pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E – Warong) di Kecamatan Banyumanik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Elektronik Warong Gotong Royong (E – Warong) di Kecamatan Banyumanik.

Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Anggara, 2014:134) administrasi negara merupakan

bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga PBB disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses.

Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiie , (2006:23) administasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaa kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhinga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari beberapa definisi administrasi publik para ahli, dapat ditarik definisi konseptual, yakni administrasi publik adalah suatu proses koordinasi dalam mengformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik.

2. Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Sahya Anggara, 2014:367) memilah-milah bahwa ada lima kelompok corak berpikir para pakar tentang keberadaan ilmu administrasi publik, yaitu sebagai berikut :

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikontomi Politik dan Administrasi, Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi, Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi, Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, dan Paradigma 6 (1990-sekarang) adalah Governance.

Berdasarkan uraian tentang paradigma administrasi publik yang telah dijabarkan sebelumnya secara konseptual, peneliti memfokuskan pada paradigma adminitrasi publik sebagai administrasi publik yang memiliki fokus pada manajemen publik dan berbasis pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan suatu program untuk mengatasi suatu permasalahan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

3. Manajemen Publik

Luther Gulick (dalam Handoko, (2008:11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

James A F Stoner (dalam Handoko, (2008:8) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi

lainnya agar mencapaitujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen publik yang telah dijelaskan oleh para ahli ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan suatu penggunaan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha perorangan atau kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Romzek dan Ingraham (dalam Sangkala, (2012:03) diartikan sebagai sebuah kondisi dasar yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan seseorang terhadap hasil kinerja yang diharapkan. Pihak-pihak yang memberikan jawaban tersebut harus memiliki legitimasi-keabsahan untuk mengontrol sumberdaya dan harapan-harapan rakyat. Tanpa pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkiraan muncul sering tidak jelas sehingga membuat konflik semakin sering terjadi. Perspektif fungsional, J.D Stewart (dalam Andriyanto, (2007:23) dimensi yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal compliance) ke dimensi yang membutuhkan lebih

banyak ukuran-ukuran subyektif. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Mahsun, (2006 : 90-97) mengemukakan faktor pendorong diantaranya kepemimpinan, kepercayaan, transparansi, kejelasan, rasa kepemilikan dan faktor penghambat akuntabilitas yaitu kekurangan sumber daya dan *lack off follow-through*.

METODA PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan subjek penelitian yakni informan, yang mengetahui dan terlibat dalam program. Dengan teknik pemilihan informan yakni purpose sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, sumber tertulis, dan foto. Sumber data dalam penelitian ini adalah berbentuk data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni

observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program E-Warong di luncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Analisi hasil penelitian berdasarkan aspek-aspek yang sangat penting berkaitan dengan dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong), berikut uraian analisisnya :

1. Dimensi Akuntabilitas

Legalitas

Dapat dilihat melalui sub indikator :

1) Kepatuhan terhadap peraturan

Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) selalu patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

2) Kesesuaian pelaksanaan

Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) sudah dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku

2. Dimensi Akuntabilitas Proses

Dapat dilihat melalui sub indikator :

1) Proses pelaksanaan

Proses Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Koordinator Program Kota Semarang.

2) Proses pembuatan laporan pertanggungjawaban

Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dibuat dalam sebulan sekali.

3. Dimensi Akuntabilitas Program

Dapat dilihat melalui sub indikator :

1) Strategi yang digunakan

Strategi yang digunakan yaitu pendampingan dan koordinasi yang

baik dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong).

2) Penggunaan modal

Penggunaan Sumberdaya Modal dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) hanya diberikan dari Pemerintah karena Program ini merupakan program turunan dari pemerintah.

3) Capaian hasil

Capaian Hasil dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) kurang baik, karena program ini bersifat membantu saja tidak untuk mengurangi angka kemiskinan.

4. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Dapat dilihat melalui sub indikator :

1) Target capaian

Dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) belum mencapai target dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin. Program E-Warung dinilai hanya membantu masyarakat dalam kebutuhan pangan.

2) Alur kerja tim

Alur Kerja Tim dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) yang diberikan sudah baik melalui koordinasi dari lini atas hingga bawah.

3) Tindakan untuk capaian

Tindakan yang dilakukan sama halnya dalam menerapkan strategi pendampingan dan pengarahan dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong).

5. Dimensi Akuntabilitas

Kebijakan

Dapat dilihat melalui sub indikator :

1) Pelaksanaan program berdasarkan peraturan

Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 8 Tahun 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan Program.

2) Pemanfaatan SDM

Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong)

mengalami keterbatasan sumberdaya dalam penjagaan warung yang menjadi sarana penyaluran bantuan kepada masyarakat.

6. Dimensi Akuntabilitas

Finansial

Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan secara berurutan dan disusun setiap sebulan sekali untuk mempermudah penyampaian laporan dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong).

Selanjutnya analisa hasil penelitian berdasarkan aspek-aspek yang sangat penting berkaitan dengan Akuntabilitas Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik yang dapat dilihat dari faktor penghambat dan faktor pendorong akuntabilitas. Berikut uraian analisisnya :

Faktor Penghambat

1. Kekurangan sumber daya manusia

Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) mengalami kekurangan sumberdaya

dalam penjagaan warung yang ada di Kelurahan Padangsari.

2. Lack off follow-through

Dalam Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) karyawan harus menunggu perintah dari pimpinan untuk mengatasi masalah di lapangan.

Faktor Pendorong

1. Kepemimpinan

Pemimpin selalu memberikan arahan kepada anggotanya dalam pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong).

2. Kepercayaan

Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) memiliki rasa kepercayaan antara anggota sehingga memberikan manfaat bagi organisasi.

3. Transparansi

Adanya transparansi dalam memberikan informasi yang jelas melalui sosialisasi mengenai Pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong).

4. Kejelasan

Kejelasan dalam Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) dengan pembuatan laporan pertanggung jawaban dalam kegiatan yang dilakukan setiap sebulan sekali.

5. Rasa kepemilikan

Rasa Kepemilikan sudah diterapkan setiap anggota menjadi tanggungjawab individu, kelompok ataupun lembaga dalam pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong).

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan Program E-Warong di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan optimal, dilihat dari masih adanya dimensi akuntabilitas yang belum tercapai.

Dimensi Akuntabilitas kinerja untuk target capaian dari program yang belum tercapai, kembali lagi pada tujuan program yaitu

pengentasan kemiskinan sementara program ini cenderung hanya membantu dalam memenuhi keperluan masyarakat dan kurangnya sumberdaya manusia meskipun sumberdaya yang dimiliki sudah melakukan tugas dengan baik dan dimanfaatkan dengan maksimal. Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik kurang bisa mencapai target dalam hal menurunkan jumlah masyarakat miskin. Walaupun demikian dimensi akuntabilitas yang sudah sesuai yaitu akuntabilitas legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Akuntabilitas Pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik yaitu faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumberdaya dalam pelaksanaan Program E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik mengalami kendala dengan kurangnya sumberdaya yang dimiliki yang mengakibatkan kekosongan

penjagaan warung sebagai sarana penyaluran bantuan kepada masyarakat dan lack off follow-through (lambannya respon pimpinan) dalam pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik pimpinan lamban dalam memberikan tanggapan mengenai masalah yang terjadi dilapangan. Faktor pendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik yaitu indikator kepemimpinan, kepercayaan, transparansi, kejelasan, dan rasa kepemilikan.

SARAN

Berikut saran yang dilihat dimensi akuntabilitas :

1. Evaluasi program secara rutin setelah pelaksanaan Program E-Warung dan menggunakan strategi yang tepat untuk meningkatkan capaian hasil program.
2. Peningkatan kinerja dengan pembagian tugas berdasarkan kemampuan yang dimiliki pada tim pelaksana Program E-

Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik dan memberikan strategi yang tepat atau penyusunan tindakan program sebelum merealisasikan Program E-Warung melalui Participatory Learning and Action (PLA) dalam mencapai tujuan.

3. Peningkatan alokasi sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Banyumanik.

Saran yang dilihat dari faktor-faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumberdaya manusia yang dimiliki untuk menjaga warung yang digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan agar tetap buka setiap hari.
2. Lack Off Follow-through (respon pemimpin yang lamban) dapat diatasi dengan :
 - a) Keikutsertaan pemimpin pada tahap sosialisasi Program E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong) di Kecamatan Banyumanik;

- b) Pemimpin harus memberikan respon yang cepat dan tanggap;
- c) Pemimpin harus berupaya memecahkan setiap masalah dengan cara mengembangkan karyawannya untuk memecahkan masalah tersebut.

DAFTAR PUSKTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2003. "The New Public Service : Service Rather than Steering. *Public Administration Review* 60 (6).
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Freshka, Hasiani. 2015. *Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengaruhnya*. Jakarta : Aditya Media
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 2006. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta : Bina Rupa
- Hadi, Prayitno. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFEE-Yogyakarta.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hariani, Dyah. 2012. *Azaz-azaz Manajemen*. Semarang : UPT UNDIP.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hellriegel, Don dan John W. Slocum. 2004. *Management*. Yogyakarta : BPFEE UGM
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama)*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kunarjo. 2003. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukur Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFEE.
- Mardiatmo. 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

- Miftah, Thoha. 2005. *Perilaku Konsep Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- M.Shen, Y.Chen. 2007. *Retailing Management Pers.* Jakarta : EGC
- Nurhadi. 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Sangkala. 2012. *Dimensi-dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Sedamayanti. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Refika Aditama Ereson.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP BES.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Alfabeta : Bandung.
- Suharto. 2012. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: ALFABETA.
- Sunyana, Latief. 2009. *Implementasi Kebijakan*. Bandung : Buana Pustaka.
- Syafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber lain :

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui EElektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Miskin

Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

<https://www.kemsos.go.id/>

<http://jateng.tribunnews.com>

<http://beritajateng.net>

Jurnal :

Aprizal, Jon Roi Tua Purba. 2013. *Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Pangkal Pinang Tahun 2013*. Pangkalpinang : Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (Vol 18, No 1 - Mei 2013).

Suhita, Damayanti. 2014. *Transparansi, Akuntabilitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPS) Kesehatan di Surakarta*. Surakarta : Jurnal Transformasi (Volume I Halaman 1 – 51)

- Farid, Muhammad, Erfina, Alwi. 2012. *Akuntabilitas Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Sindenreng Rappang*. Sindenreng : Jurnal Akuntabilitas.
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Surabaya : Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Vol. 2, No. 2, Nopember 2000) Hal 138 – 150
- Cleare, Thomas W. 2011. *An Analysis of Accountability in Public – Private Health Care Programs Serving Vulnerable Populations*. Florida : Jurnal Of Accountability (6) Hal : 197-224.